



Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Analysis of Labor Absorption and Indonesia's Economic Growth

Asrahmaulyana

Program Studi Ilmu Ekonomi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: asrah.mauliyana@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna memacu pembangunan ekonomi serta meningkatkan serapan tenaga kerja, sehingga diperlukannya peran pemerintah yang aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data meliputi *time series* dan bersumber dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* atau analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah dan upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Secara parsial penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum.

ABSTRACT

High economic growth is needed to spur economic development and increase labor absorption, so an active government role is needed. This study aims to determine the factors that influence economic growth through absorption of labor. This study uses secondary data that is quantitative. The data includes time series and are sourced from agencies/institutions related to research. The analytical method used in this research is path analysis or path analysis. The results showed that simultaneously foreign direct investment, government expenditure and the minimum wage had an effect on economic growth and absorption of labor. Partially, foreign direct investment has no effect on economic growth and absorption of labor. Government expenditure has an effect on absorption of labor but has no effect on economic growth. The minimum wage affects economic growth and absorption of labor. Absorption of labor has no effect on economic growth in Indonesia.

Keywords: *Economic Growth, Absorption of Labor, Foreign Direct Investment, Government Expenditure, and Minimum Wage.*



PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang sangat berat bagi perekonomian global tak terkecuali Indonesia, bukan hanya bagi aspek kemanusiaan dan kesehatan, tetapi bagi aspek ekonomi dan sosial pula. Penyebab turunnya aktivitas ekonomi masyarakat dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan mobilitas, seperti penerapan protokol kesehatan dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung stabil, masing-masing sebanyak 5,03 persen tahun 2016, 5,07 persen pada tahun 2017, tahun 2018 meningkat menjadi 5,17 persen, dan menurun pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5,02 persen. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mulai melemah. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi hingga mencapai -2,07 persen (BPS, 2021).

Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia tentunya ingin melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai cita-cita perekonomian yang diinginkan. Pemacu pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada bidang-bidang lainnya, dan juga sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki tingkat sosial yang terlalu timpang.

Dalam teori ekonomi makro dari sisi pengeluaran, produk domestik bruto adalah penjumlahan dari beberapa variabel termasuk didalamnya investasi. Dengan menaikkan nilai investasi domestik maupun asing, akan menambah stok modal dan meningkatkan produktivitas, dimana dalam prosesnya membutuhkan faktor produksi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Rofii & Putu, 2017), dengan begitu perekonomian Indonesia dapat berkembang dengan baik. Salah satu stok modal dapat diperoleh melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal Asing (PMA) mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di negara yang sedang berkembang. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang cukup stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri (Safira, et al. 2018).

Pada tahun 2020, Indonesia terus berupaya dalam menangani perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat dari investasi dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan investasi menopang perekonomian di Indonesia, yang didorong oleh giatnya pengembangan pembangunan dan non-pembangunan dari pihak pemerintah maupun swasta. Indonesia mengalami perbaikan realisasi investasi pada kuartal I-2021 sebesar Rp 219,7 triliun. Angka ini naik 4,3% dari periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar Rp 210,7 triliun. Investasi pada kuartal ini ditopang oleh investasi asing (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp 111,7 triliun yang naik hingga 14% dibandingkan kuartal I-2020 yang hanya sebesar Rp 98 triliun.

Disamping investasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya kegiatan ini disebut sebagai belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) (Desky, 2020).

Pengeluaran pemerintah yang terkait dengan pembangunan ekonomi bersifat eksogen. Artinya, pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi (Solikin, 2018). Pengeluaran pemerintah termasuk alat fiskal selain penerimaan pajak. Menurut Sukirno (2004), kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1.181.613,1 miliar rupiah, meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 1.239.469,7 miliar rupiah (2017); 1.338.638,6 miliar rupiah (2018); 1.394.795,3 (2019); dan 1.433.686,3 miliar rupiah (2020). Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi kuantitas.

Meskipun pengeluaran konsumsi pemerintah bukan termasuk kontributor tertinggi dalam pembentukan PDB, besaran kontribusi komponen ini mengalami peningkatan dari 8,81% pada tahun 2019 menjadi 9,29% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena meningkatnya belanja pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah juga menjadi salah satu unsur pendorong dalam meningkatkan besaran nilai PDB.

Kebijakan fiskal ekspansif ditempuh pemerintah guna mengatasi dampak pandemi baik dari aspek kesehatan dan kemanusiaan maupun aspek perekonomian yang turun tajam. Menurut laporan Bank Indonesia, pada awal tahun 2020 pemerintah menggelontorkan dana untuk belanja serta bantuan sosial dan jaminan ketersediaan pangan. Seiring dampak pandemi Covid-19 yang meluas, arah kebijakan fiskal ekspansif yang diperkuat UU No. 2 Tahun 2020 memberikan dasar bagi pemerintah untuk memperlebar defisit fiskal di atas 3% dari PDB hingga tahun 2020.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang meningkat akan menambah jumlah tenaga kerja dan memungkinkan suatu negara untuk menambah produksi (Ramadhania, 2019).

Pandemi Covid-19 secara bersama-sama memberikan dampak pada permintaan dan penawaran dalam perekonomian global, namun tidak hanya di bidang ekonomi saja tetapi juga di bidang sosial, politik dan ketenagakerjaan. Dari sisi penawaran, produktivitas dan suplai tenaga kerja menurun. Pembatasan mobilitas sosial yang diberlakukan memberikan dampak pada penutupan berbagai

gerai ritel sehingga mengganggu pasokan barang dan jasa. Dari sisi permintaan, hilangnya pendapatan, terjadi PHK akibat karantina, morbiditas dan pengangguran serta berkurangnya investasi perusahaan dan konsumsi rumah tangga terjadi karena memburuknya prospek ekonomi (Asare & Richard, 2021).

Sebagian negara memerintahkan masyarakatnya untuk stay at home (tinggal di rumah) dan aktivitas ekonomi pun dibekukan. Di beberapa negara penimbunan terjadi karena orang-orang memprioritaskan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan dasar seperti; tisu toilet, pasta, dan nasi (Spash, 2020). Indonesia turut memberlakukan kebijakan untuk menghentikan penyebaran yaitu dengan membatasi aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan seperti di kantor, pabrik, perusahaan dan tempat-tempat usaha lainnya, dan digantikan dengan kebijakan WFH (*Work From Home*). Tentunya tidak hanya menyebabkan terganggunya kelangsungan bekerja dan berusaha, tetapi jutaan pekerja juga terpaksa berhenti bekerja untuk sementara bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.

Masalah penyerapan tenaga kerja juga berkaitan erat dengan kebijakan upah minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dibayarkan oleh produsen sebagai balas jasa kepada tenaga kerja atas kegiatan produksi yang dilakukan. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum barang dan jasa yang bersedia dibeli oleh seorang konsumen pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan (Wihastuti, et al. 2018).

BAHAN DAN METODE

Jenis data yang digunakan yaitu data yang bersifat kuantitatif. Adapun penelitian kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan penekatan deduktif-induktif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder bersifat time series dalam bentuk tahunan pada periode 2000-2020. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber seperti dengan melihat sumber berupa dokumen atau laporan yang memang sudah dipublikasi secara umum dari beberapa instansi terkait.

Pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan analisis jalur (*path analysis*). Metode path analysis adalah suatu metode yang mengkaji pengaruh (efek) langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap suatu variabel terikat (Sudaryono, 2019). Metode ini berfungsi dalam membaca hubungan sebab akibat atau kausalitas pada regresi linear berganda apabila variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen dan pengaruh secara tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Model yang digunakan dalam penelitian yaitu model analisis jalur dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan bantuan program *Eviews 9.0*, yang mana variabel independen adalah penanaman modal asing (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan upah minimum (X_3), pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (Y_2) dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening (Y_1). Adapun model persamaannya berikut ini:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Perbedaan satuan ukur dalam variabel penelitian menyebabkan perasamaan regresi awal ditransformasikan menjaadi logaritma (log) dengan tujuan menyeragamkan ukuran data menjadi terstandar statistik. Dengan demikian model persamaan dalam bentuk logaritma menadi sebagai berikut:

$$Y_1 = \text{Log} \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log} X_1 + \alpha_2 \text{Log} X_2 + \alpha_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (3)$$

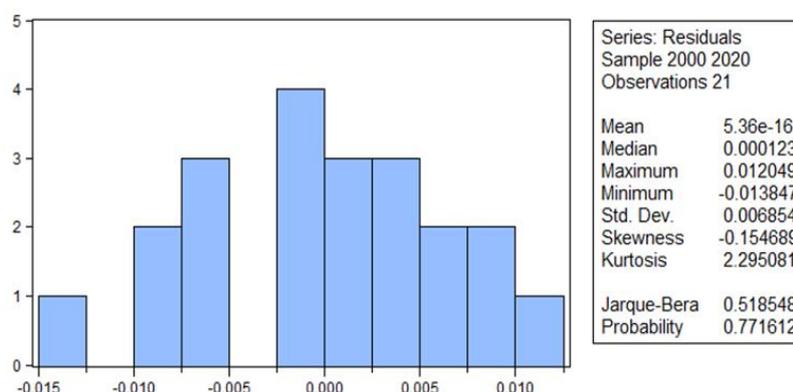
$$Y_2 = \text{Log} \beta_0 + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \text{Log} Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (4)$$

Dimana X_1 adalah penanaman modal asing, X_2 adalah pengeluaran pemerintah, X_3 adalah upah minimum, Y_1 adalah penyerapan tenaga kerja, Y_2 adalah pertumbuhan ekonomi, α_0 adalah koefisien konstanta, dan e adalah error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan model yang benar, dengan kata lain model yang diwujudkan harus menghindari penyimpangan. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji autokolerasi. Adapun hasil pengujian normaitas dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Output Eviews 10, 2022

Dari hasil uji normalitas residual pada gambar 2 menggunakan data dalam

penelitian ini maka diperoleh nilai probability 0,771 yang lebih besar dari 0,05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 1: Hasil uji multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	0,807637	0,879654
X2	0,807637	1,000000	0,903882
X3	0,879654	0,903882	1,000000

Sumber: Output Eviews 10, 2022

Pada hasil uji multikolinearitas maka diperoleh nilai dari hubungan antara variabel independen yang masing-masing tidak lebih dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 2. Uji autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0,926443	Prob. F(2,14)	0,4175
Obs*R-squared	2,308839	Prob. Chi-Square(2)	0,3152

Sumber: Eviews 10 data diolah, Tahun 2022

Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, menunjukkan nilai signifikansi *probability chi-square* $0,3152 > 0,05$, maka hal ini menandakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 3. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0,400576	F-statistic	0,7544
Obs*R-squared	1,386477	Obs*R-squared	0,7087

Sumber: Eviews 10 data diolah, Tahun 2022

Pada hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi *probability chi-square* $0,7087 > 0,05$, maka hal ini menandakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pada uji signifikansi simultan (uji F) dalam model I, diperoleh nilai *probability F-statistic* sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4: Hasil uji t statistik model I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,404422	0,115304	64,21675	0,0000
X1	0,011443	0,012298	0,930479	0,3651
X2	0,084142	0,012604	6,675645	0,0000
X3	3,130008	6,250009	5,014027	0,0001

Sumber: Eviews 10 data diolah, Tahun 2022

Pada uji parsial atau uji t variabel independen penanaman modal asing (X1) menunjukkan nilai signifikansi α sebesar $0,365 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} 0,930479 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,1199, maka variabel penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan hasil tersebut maka hipotesis ditolak.

Variabel pengeluaran pemerintah (X2) menunjukkan nilai signifikansi α sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} 6,675645 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,1199, maka variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan hasil tersebut maka hipotesis diterima.

Variabel upah minimum (X3) menunjukkan nilai signifikansi α sebesar $0,0001 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} 5,014027 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,1199, maka variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan hasil tersebut maka hipotesis diterima.

Tabel 5: Hasil uji t statistik model II

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21,74368	21,44186	-1,014076	0,3256
X1	-0,012658	0,150220	-0,084262	0,9339
X2	0,177191	0,285801	0,619981	0,5440
X3	-2,860007	1,170007	-2,443390	0,0265
Y1	2,721280	2,889867	0,941662	0,3604

Sumber: Eviews 10 data diolah, Tahun 2022

Pada hasil uji signifikansi simultan (uji F) model II, diperoleh nilai probability F-statistic sebesar 0,05 tidak lebih dari 0,05 artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji parsial atau uji t pada model II, menunjukkan nilai signifikansi α variabel penanaman modal asing sebesar $0,9339 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} $-0,084262$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,1199, artinya variabel penanaman modal asing (X1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka hipotesis ditolak. Alvarado (2017) dengan judul penelitian "*Foreign Direct Investment and Economic Growth in Latin America*" menemukan hasil bahwa FDI tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel pengeluaran pemerintah (X2) menunjukkan hasil signifikansi α sebesar $0,5440 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} $0,619981$ lebih besar dari nilai t_{tabel} $2,1199$, artinya variabel pengeluaran pemerintah (X2) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka hipotesis ditolak. Santika & Riatu (2020) dengan judul penelitian “*Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”, menemukan bahwa apabila *government size* masih relatif kecil, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif, namun apabila *government size* sudah terlalu besar, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi negatif atau bersifat tidak linear.

Variabel upah minimum (X3) menunjukkan hasil signifikansi α sebesar $0,0265 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $-2,443390$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} $2,1199$, artinya variabel upah minimum (X3) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka hipotesis diterima.

Variabel penyerapan tenaga kerja (Y1) menunjukkan nilai signifikansi α sebesar $0,3604 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} $0,941662$ lebih kecil dari nilai t_{tabel} $2,1199$, artinya variabel penyerapan tenaga kerja (Y1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka hipotesis ditolak.

Analisis Jalur (*path analysis*)

Adapun hasil dari perhitungan analisis jalur atau *path analysis* dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Hasil analisis jalur

Pengaruh antar variabel	Pengaruh langsung	Tingkat signifikansi	Pengaruh tidak langsung melalui Y ₁	Total pengaruh
X1 → Y1	0,011	0,365	-	0,011
X2 → Y1	0,084	0,000	-	0,084
X3 → Y1	3,130	0,000	-	3,130
X1 → Y2	-0,013	0,934	-0,035	-0,048
X2 → Y2	0,177	0,544	0,482	0,659
X3 → Y2	-2,860	0,026	-7,782	-10,642
Y1 → Y2	2,721	0,360	-	2,721

Sumber: Eviews 10 data diolah, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Model 1: $Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1X_1 + \alpha_2X_2 + \alpha_3X_3 + e_1$
 $Y_1 = 7,404 + 0,011X_1 + 0,084X_2 + 3,130X_3 + 0,130 \dots\dots\dots(5)$

Model 2: $Y_2 = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Y_1 + e_2$
 $Y_2 = -21,744 - 0,013X_1 + 0,177X_2 - 2,860X_3 + 2,721Y_1 + 0,758 \dots\dots(6)$

Diketahui bahwa nilai pengaruh langsung variabel penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,013$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,934$, sedangkan pengaruh tidak langsung penanaman modal asing melalui penyerapan tenaga kerja sebesar $-0,035$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung. Berdasarkan hasil estimasi tersebut maka penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

Nilai pengaruh langsung variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,177$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,544$, sedangkan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah melalui penyerapan tenaga kerja sebesar $0,482$, hal ini menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Maka berdasarkan hasil tersebut pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

Nilai pengaruh langsung variabel upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar $-2,860$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,026$, sedangkan nilai pengaruh tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja sebesar $-7,782$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung, maka berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh antar variabel

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 7 yang menunjukkan nilai signifikansi variabel penanaman modal asing (X_1) sebesar $0,365$ lebih besar dari $0,05$, berarti bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Kunto (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Amelia (2018) menunjukkan hasil bahwa PMA tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Nilai signifikansi pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ dengan koefisien sebesar $0,084$, hal ini berarti pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Produksi yang meningkat akan membutuhkan modal tenaga kerja baru dan serapan tenaga kerja meningkat dengan begitu pengangguran akan berkurang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desky (2020) menunjukkan hasil bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian juga dilakukan oleh Pratiwi & I Gusti (2019) hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Melalui hasil estimasi yang dilakukan, pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiyatna, dkk (2016) yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan di atas, menunjukkan nilai signifikansi penanaman modal asing sebesar 0,934 lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira, dkk. (2018) hasilnya menunjukkan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil estimasi penelitian di atas, menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,544 lebih besar dari 0,05, berarti pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang dalam memanfaatkan pengeluaran melalui anggaran belanja tersebut untuk dialokasikan penggunaannya terhadap sektor-sektor yang potensial di suatu daerah. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Hakim & Rosita (2020) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan pada Tabel 7, menunjukkan hasil signifikansi variabel upah minimum (X_3) sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Windayana & Ida (2020) menemukan hasil bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Julianto & Suparno (2016) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya.

Melalui peningkatan kesempatan kerja, angkatan kerja akan terserap dengan baik di pasar tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dengan begitu daya beli meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil estimasi yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0,360 lebih besar dari 0,05, hal ini berarti penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2019), Hasil penelitiannya adalah penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada Tabel 7 diketahui bahwa pengaruh langsung penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,013 dan tingkat signifikansi sebesar 0,934, sedangkan pengaruh tidak langsung penanaman modal asing melalui penyerapan tenaga kerja sebesar -0,035. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung. Berdasarkan

hasil estimasi tersebut maka penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Pasar domestik yang terbilang masih kecil di Indonesia menyebabkan *rate of return* modal menjadi rendah. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil dan teknologi masih kurang sehingga pengembangan penanaman modal asing masih terhambat. Selain itu rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor belum terlaksananya dengan baik transfer teknologi (Kustituantanto & Istikomah, 1999).

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,177 dan tingkat signifikansi sebesar 0,544, sedangkan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah melalui penyerapan tenaga kerja sebesar 0,482, hal ini menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Maka berdasarkan hasil tersebut pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Laksono (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan output yang dihasilkan suatu sektor ekonomi. Meningkatnya penerimaan masyarakat yang berasal dari pengeluaran pemerintah, mendorong permintaan secara agregat dan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Agar mencapai tingkat output yang diinginkan produsen membutuhkan input produksi salah satunya adalah tenaga kerja baru. Dengan demikian, naiknya pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja bagi masyarakat.

Nilai pengaruh langsung variabel upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -2,860 dan tingkat signifikansi sebesar 0,026, sedangkan nilai pengaruh tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja sebesar -7,782. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung, maka berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

Penerapan upah minimum tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini dikarenakan meskipun upah mengalami peningkatan para pekerja tetap pada pengeluaran konsumsi yang sama seperti sebelum peningkatan upah. Selain itu, meningkatnya upah minimum menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi bagi perusahaan sehingga produsen akan melakukan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi penggunaan faktor produksi.

Menurut Sulistiawati (2013), tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah, kualitas dan produktivitas yang rendah pula akan terkena dampak dari pengurangan tenaga kerja tersebut. Hal ini menyebabkan pengangguran mengalami peningkatan. Secara tidak langsung kenaikan upah minimum tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, karena dengan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatnya pengangguran hanya akan menyebabkan perekonomian tumbuh melambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah dan upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Secara parsial penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pasar domestik yang terbilang masih kecil di Indonesia menyebabkan *rate of return* modal menjadi rendah. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil dan teknologi masih kurang sehingga pengembangan penanaman modal asing masih terhambat. Selain itu rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor belum terlaksananya dengan baik transfer teknologi (Kustitunto & Istikomah, 1999).

Saran kepada pemerintah diharapkan untuk menerapkan kebijakan mengenai penanaman modal asing yang lebih menguntungkan terhadap negara Indonesia, dan melakukan pemerataan distribusi pendapatan agar seluruh daerah merasakan hasil yang sama guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih fokus dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan para angkatan kerja agar bisa terserap dengan baik di perusahaan-perusahaan besar.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Alvarado, R., Maria, I., & Pablo, P. (2017). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Latin America. *Economic Analysis and Policy*, 56 (176-187).
- (2) Asare, P., & Richard, B. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Economy: Emphasis on Poverty Alleviation and Economic Growth. *Economics*, 8(1), 32-43.
- (3) Atiyatna, Dirta Pratama., Nurlina T. Muhyiddin., B. B. S. (2016). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan pendidikan terhadap Penyerpan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (1): 8-21.
- (4) Badan Pusat Statistik, 2021. *Statistik Indonesia 2021*.
- (5) Bank Indonesia, 2020. *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*.
- (6) Desky, T. R. (2020). Pengaruh Investasi, Ekspor dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel Intervening di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.

- (7) Dewi, L. K., & Kunto, I. G. (2018). Analisis Pengaruh Investasi PMA, PMDN, Nilai Prodksi Dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Provinsi Jawa Timur. *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(02).
- (8) Kaulihowa, T., & Charles, A. (2017). FDI and Income Inequality in Africa. *Oxford Development Studies*, 46(2), 250-265.
- (9) Kustituantio, B., & Istikomah, I. (1999). Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14(2).
- (10) Ramadhania, M. (2019). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pariwisata di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- (11) Rofii, Andrik M., Putu, S. A. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2, 303-316.
- (12) Safira, E., Syechalad, M. N., Asmawati, A., & Murlida, E. (2018). Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja Dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 109-117.
- (13) Santika, A. R., & Qibthiyah, R. M. (2020). Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 212-230.
- (14) Siregar, R. E. W. (2020). Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Industri Pengolahan dengan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Lampung Selatan). (*Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).
- (15) Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65-89.
- (16) Spash, C. L. (2020). 'The economy' as if people mattered: revisiting critiques of economic growth in a time of crisis. *Globalizations*, 1-18.
- (17) Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.
- (18) Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar (edisi ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (19) Wihastuti, Latri., & Henny., R. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1 (1), 96-102.
- (20) Windayana, I. B. A. B., & Ida, B.D. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan

Asrahmaulyana : *Analisis Penyerapan Tenaga ...*

Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 57-72.